

Tren bunga kredit bisa saja ada yang tetap, atau menurun.

Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk

Kontan Selasa, 16 Maret 2021

Konter

Memperkuat Modal Usaha, AGRS Bakalan Right Issue

JAKARTA. PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) akan memperkuat modal usahanya. Direktur Bank IBK Indonesia Alexander Frans Rori menuturkannya, perseroan telah memberitahu rencana ini ke publik.

IBK Bank Indonesia mencari modal baru melalui skema Penawaran Umum Terbatas (PUT) III alias *rights issue* dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ke para pemegang saham perseroan. Bila tak ada aral melintang, hal ini akan dilakukan pada awal 2021.

"PUT III akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 7,28 miliar lembar saham. Dana yang diperoleh dari penambahan modal melalui PUT III akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan modal kerja," tutur Alexander dalam *public expose insidental* bank tersebut, Senin (15/3).

Ia menyatakan, IBK Bank Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 18 Januari 2021 lalu, untuk mendapatkan persetujuan atas penambahan modal tersebut.

Sebelumnya, pemegang saham pengendali AGRS juga telah memperkuat modal bank. Ini terlihat dari rasio kecukupan modal turun membaik terlihat dari CAR naik dari level 26,50% menjadi 35,27% di September 2020. Alexander menyebut posisi itu di atas rata-rata industri pada September 2020 sebesar 23,52%.

"Pertumbuhan CAR ini adalah akibat dari penambahan modal dari pemegang saham pengendali yakni Industrial Bank of Korea. Komposisi pemegang saham perseroan sebanyak 97,50% oleh Industrial Bank of Korea dan 2,5% oleh masyarakat," ujar dia.

Maizal Walfajri

RUPS Bank Mandiri



KONTAN/Carolus Agus Wuluyo

Komisaris Utama Bank Mandiri M. Chatib Basri (kiri) bersama Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kanan) saat RUPS Tahunan Bank Mandiri 2021 di Jakarta, Senin (15/3). Pemegang saham menyetujui besaran dividen sebesar 60% dari laba bersih tahun 2020 atau sekitar Rp 10,27 triliun (sekitar Rp 220 per lembar saham). Dengan memperhitungkan komposisi saham merah putih yang sebesar 60%, maka Bank Mandiri akan menyetorkan dividen sekitar Rp 6,16 triliun ke kas Negara.

Jaga NIM Agar Tidak Tergerus Dalam

Bank Mandiri menargetkan NIM 4,6%-4,8% dan BRI 6,3% Tahun 2021

Marshall Sautlan, Dina Hutauruk

JAKARTA. Tren penurunan suku bunga perbankan berjalan mengiring kebijakan Bank Indonesia (BI) memangkas bunga acuan. Namun kebijakan bank memangkas suku bunga dasar kredit (SBDK) tentu berdampak ke margin bunga bersih atau *Net Interest Margin* (NIM) yang menipis.

Pada, sepanjang tahun lalu NIM perbankan sudah tergerus akibat tekanan pandemi Covid-19 serta meningkatnya beban yang harus ditanggung perbankan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, NIM bank umum konvensional per Desember 2020 berada di level 4,45%. Angka itu lebih rendah dibandingkan posisi per Desember 2019, yaitu 4,91%.

Untuk menjaga agar NIM tidak tertekan terlalu dalam, sejumlah bank pun menyiapkan strategi. PT Bank Mandiri Tbk, misalnya, menargetkan NIM di tahun ini berada di kisaran 4,6% hingga 4,8%. Adapun di tahun 2020, NIM bank ini sebesar 4,65% turun dari 5,56% di tahun sebelumnya.

Sigit Prastowo, Direktur Keuangan Bank Mandiri, mengatakan, bank yang memiliki kode saham BMRI itu sudah memiliki strategi untuk menjaga NIM bergerak di kisaran target. "Bank Mandiri akan mendorong efisiensi dan menekan biaya dana atau *cost of fund* (CoF) melalui peningkatan dana murah," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Senin (15/3).

Upaya penurunan suku bunga deposito yang dilakukan bank ini pada kuartal III dan IV tahun lalu berhasil menurunkan biaya dana dari 2,9% pada 2019 menjadi 2,5%. Bank Mandiri akan terus memangkas CoF hingga mendekati 2% di tahun ini.

Bank Mandiri mulai menurunkan SBDK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sigit mengungkapkan dengan penurunan bunga ini perseroan optimistis, dan berharap penyaluran kredit baru akan meningkat.

Per 28 Februari 2021, SBDK Bank Mandiri turun untuk segmen korporasi menjadi 8%, segmen ritel menjadi 8,25% dan segmen mikro 11,25%. Sedangkan SBDK segmen konsu-

mer untuk KPR turun menjadi 7,25% dan konsumen non KPR jadi 8,75%.

SBDK akan menjadi acuan bunga kredit ke debitur. Suku bunga yang dikenakan pada debitur akan memperhitungkan estimasi premi risiko yang dapat berbeda-beda berdasarkan tingkat risiko kredit masing-masing debitur. Pada Ta-

Bank Mandiri mengutamakan efisiensi serta menekan biaya dana untuk menjaga NIM.

han 2020, Bank Mandiri telah menurunkan SBDK sebanyak 7 kali, dengan besaran masing-masing berkisar 10 basis poin hingga 600 basis poin.

Sulit diprediksi

Sedang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) memproyeksikan margin bunga bersih bakal meningkat di tahun ini. Bank menargetkan NIM terja-

ga di kisaran 6,3%. Tahun lalu, NIM perseroan tergerus menjadi 5,86% dari 6,73% tahun sebelumnya.

Sunarjo. Direktur Utama BRI optimistis ekonomi di tahun ini akan membaik. BRI menargetkan pertumbuhan kredit berada di kisaran 6%-7% tahun ini dengan fokus penyaluran ke segmen mikro dan kecil. Sunarjo menuturkan, target ditetapkan dengan menimbang potensi pertumbuhan yang telah tampak sejak kuartal akhir tahun lalu.

Sementara Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menyebut sulit memprediksi tren NIM. Ia menjelaskan, margin bunga bersih terjadi karena kombinasi antara volume kredit dan suku bunga per jenis-jenis kredit.

"Bunga kredit tidak satu angka. Tren bunga kredit bisa saja ada yang tetap atau menurun. Bunga kredit yang selesai restrukturisasi bisa saja naik. Jadi susah memprediksi NIM ini," ujar. Meski sulit diprediksi, BCA memproyeksikan NIM di tahun ini sama, atau lebih rendah daripada NIM di tahun 2020. ■

INSENTIF PAJAK UNTUK BPKH

Likuiditas Bank Syariah Bertambah

JAKARTA. Nilai manfaat dana kelolaan haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan dikesialkan dari pajak penghasilan (PPh). Kebijakan itu akan memberi dampak positif bagi bank syariah, yang menerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH).

John Kosasih Presiden Direktur BCA Syariah menyambut baik kebijakan yang merupakan bagian dari Undang-undang Cipta Kerja tersebut. Ia mengatakan, pengecualian pajak tersebut tentu akan meningkatkan likuiditas.

Kenaikan likuiditas itu, pada akhirnya, akan meningkatkan kegiatan ekonomi syariah untuk diinvestasikan ke instrumen berbasis syariah. Selain itu, BPIH bisa melakukan kerjasama dengan bank syariah, salah satunya melalui akad Mudharabah Muqayyadah, untuk mengelola nilai manfaat tambahan dari pengecualian pajak tersebut. "Jadi berdampak mendorong akselerasi dan peran bank syariah untuk penyaluran dana," ujar dia, Senin (15/3). Selain meningkatkan likuiditas, lanjut John, pengecualian PPh juga akan berdampak

pada ekonomi dan keuangan syariah, calon jamaah Haji, dan kinerja BPKH.

Wakil Direktur Utama II Bank Syariah Indonesia (BSI) Abdullah Firdausy Wibowo juga menyambut baik pengecualian PPh. Menurutnya, insentif tersebut bukan hanya membawa manfaat bagi BPKH dan masyarakat, tetapi juga bagi bank. "Di satu pihak, kami dapat likuiditas, di pihak lain BPKH akan dapat tambahan nilai manfaat," kata dia.

Kukuh Raharjo, Direktur Utama Bank NTB Syariah, menuturkan pengecualian pajak bisa bermanfaat bagi BPS-BPIH apabila ada ada penyelesaian nisbah bagi hasil terhadap investasi BPKH di BPS-BPIH.

Sebelumnya Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, pengecualian pajak tersebut akan menambah nilai manfaat Rp 1,49 triliun di tahun ini, dari pajak yang seharusnya disetor pada tahun 2020. Dana haji yang dikelola BPKH per Desember 2020 sebesar Rp 144,7 triliun, dan nilai manfaat yang dihasilkan Rp 7,42 triliun.

Dina Hutauruk

PT. EUREKA PRIMA JAKARTA, Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
(Perseroan)

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") pada hari Kamis, 22 April 2021, pukul 10.00 WIB s/d selesai, di Klub Eksekutif Perdana di Jl. Raya Protokol Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk RUPS akan diiklankan pada tanggal 31 Maret 2021 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia dan 1 (satu) di antaranya beredar di tempat kedudukan Perseroan.

Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang selambat-lambatnya dapat diterima Perseroan pada tanggal 26 Maret 2021.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomanian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASYKSEI") yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan RUPS. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS sejak tanggal Pengumuman RUPS sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPS yaitu tanggal 21 April 2021.

Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 Maret 2021
PT Eureka Prima Jakarta, Tbk.
Direksi

antam

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
PT ANEKA TAMBANG TBK**

Direksi PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 April 2021
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium Andrawina
Gedung Aneka Tambang Tower A
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1, Jakarta 12530

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
3. Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan tanih untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dan Nomenklatur Pengurus Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Perseroan.

b. Dalam mata acara Rapat ke-6, Perseroan akan:

- (i) menyampaikan laporan mengenai realisasi penggunaan tambahan dana Penyerahan Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan sesuai dengan periode tahun buku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyerahan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; dan
- (ii) menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum (yaitu dana hasil PUT I) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

c. Untuk mata acara Rapat ke-7, dilaksanakan sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), yang mewajibkan Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020.

d. Untuk mata acara Rapat ke-8, perubahan Pengurus dan Nomenklatur Pengurus Perseroan dilakukan sehubungan dengan adanya permintaan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), selaku kuasa pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui surat Nomor 049/DIRUT/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena iklan Penganggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.15 WIB.
3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting KSEI ("eASYKSEI")* dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASYKSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pengumuman Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASYKSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan www.antam.com, situs easy.ksei.co.id dan situs web akses.ksei.co.id.
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir secara langsung tanpa mekanisme eASYKSEI, dimana Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.antam.com. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email dam@antam.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Dalindo Entycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 1 April 2021.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta aksi pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusannya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (negatif) yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel paling lama 2 (dua) hari sebelum Rapat atau memiliki surat keterangan Tes PCR (negatif) yang berlaku 7 (tujuh) hari.
 - 2) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 °C.
 - 4) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - 5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penulanan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf c di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASYKSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
5. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
 - a. Tidak menyediakan cinderamata, makanan, dan minuman;
 - b. Dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penulanan Covid-19.
6. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat (kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-8) melalui situs web Perseroan www.antam.com. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan yaitu rups@antam.com. Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Maret 2021
PT Aneka Tambang Tbk
Direksi